

## ABSTRAK

Kebijakan pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah tidak adil khususnya bagi para pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi selalu lolos dari jeratan hukum dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan keji tersebut. Di Indonesia pengaturan hukum pidana kasus prostitusi terbatas hanya kepada mucikarinya saja sedangkan pengguna jasa dan penyedia jasa (wanita tuna susila) selalu lolos dari jeratan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di dalam KUHP menggunakan nilai-nilai hukum Islam agar tidak terjadi kekosongan hukum serta menjadi pebaharuan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi hukum yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata serta bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi di dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP sehingga menyebabkan belum dipenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat. Di dalam nilai-nilai hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang telah berzina harus mendapatkan hukuman dikarenakan hal keji tersebut sangatlah haram bahkan bagi agama manapun. Kebijakan kriminalisasi bagi para pengguna prostitusi menggunakan nilai-nilai hukum Islam sangatlah diperlukan agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas bagi pengguna jasanya. Maka dari itu, diperlukan suatu pembaharuan hukum pidana bagi pengguna jasa prostitusi menggunakan nilai-nilai Hukum Islam yang sesuai dengan Pancasila.

**Kata Kunci : Kriminalisasi, Pengguna Jasa, Prostitusi**

## **ABSTRACT**

*The policy of regulating the crime of prostitution in the Criminal Code is very unfair, especially for users of prostitution services. Users of prostitution services always escape from legal bondage due to the absence of laws and regulations governing these heinous acts. In Indonesia, the regulation of criminal law in prostitution cases is limited to the pimps, while service users and service providers (prostitutes) always escape the law. This study aims to determine the policy of criminalizing prostitution service users in the Criminal Code using Islamic legal values so that there is no legal vacuum and a legal reform for users of prostitution services.*

*The research method used is sociological juridical, namely by identifying real and functional laws in real life systems and aiming to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly to the field.*

*The results of the study indicate that there is no legislation that regulates criminalization policies against users of prostitution services in the Criminal Code and legislation outside the Criminal Code, causing the sense of justice in society to not be fulfilled. In Islamic legal values it is explained that someone who has committed adultery must be punished because this heinous thing is forbidden even for any religion. The criminalization policy for users of prostitution using the values of Islamic law is very necessary in order to produce clear and firm legislation for its service users. Therefore, a criminal law reform is needed for users of prostitution services using the values of Islamic law in accordance with Pancasila.*

**Keywords : Criminalization, Service Users, Prostitution**

